

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT  
OLEH PARTAI POLITIK DI KECAMATAN BUNGO DANI  
(Studi Pada Partai Golkar dan PAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan  
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan*



**Oleh:**

**SOFYANDI  
NIM/TH: 84626/2007**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2012**

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

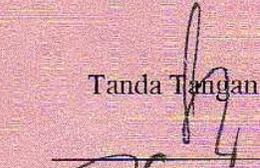
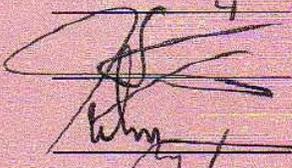
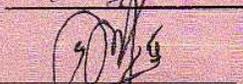
Pada hari Selasa 20 Maret 2012 Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB

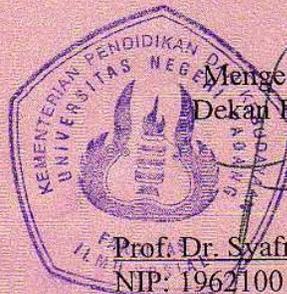
### PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT OLEH PARTAI POLITIK DI KECAMATAN BUNGO DANI (Studi Pada Partai Golkar dan PAN)

**Nama** : Sofyandi  
**TM/NIM** : 2007/84626  
**Program studi** : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
**Jurusan** : Ilmu Sosial Politik  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 20 Maret 2012

#### Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Suryanef, M.Si	
Sekretaris	: Drs. Hasrul, M.Si	
Anggota	: Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd	
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	
Anggota	: Drs. Al Rafni, M.Si	



Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, MP.d  
NIP: 19621001 198903 1 002

## ABSTRAK

Sofyandi, TM/NIM : 2007/84626, Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat oleh Partai Politik di Kecamatan Bungo Dani (Studi Pada Partai Golkar dan PAN)

Kurang maksimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat merupakan menjadi masalah dalam penelitian ini. Hal ini terlihat dari rendahnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, itu terjadi karena parpol belum serius mengadakan pendidikan politik dan hanya demi kepentingan partai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik oleh parpol, media yang digunakan oleh parpol, materi dan metoda yang digunakan oleh parpol, dan kendala-kendala serta solusi yang dilakukan oleh parpol dalam melaksanakan pendidikan politik.

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu informan penelitiannya ditentukan oleh peneliti sendiri berdasarkan kriteria tertentu. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa alat perekam, pedoman wawancara, dan alat catatan lapangan hasil studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa program pendidikan politik yang dirancang oleh partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional mengarah kepada sukses kaderisasi dan sosialisasi partai. Pelaksanaan pendidikan politik oleh kedua partai yaitu Golkar mengadakan pembinaan kepada kader partai dan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan sehari-hari serta kegiatan keolahragaan. PAN mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan mengadakan kegiatan sosial kepada masyarakat. Media yang digunakan oleh partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu media cetak (surat kabar) dan media elektronik (radio). Materi yang diberikan oleh kedua partai yaitu Golkar memberikan materi tentang visi dan misi partai dan perjuangan kepentingan masyarakat sedangkan PAN memberikan materi yang berkaitan dengan 4 pilar berbangsa dan perjuangan kepentingan masyarakat. Metode yang digunakan yaitu metode tatap muka, diskusi, simulasi dan ceramah. Kendala-kendala yang ditemui oleh partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu kurangnya komunikasi antara pengurus partai, masyarakat tidak tertarik untuk berpartisipasi, kurangnya perhatian pemerintah setempat mengenai pendidikan politik bagi masyarakat serta sarana dan prasarana. Solusi yang dilakukan oleh partai politik yaitu mencari format yang tepat untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, menjalin komunikasi yang lebih baik antara pengurus partai dan fokus pembinaan kader partai.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Oleh Partai Politik Di Kecamatan Bungo Dani (studi pada partai Golkar dan PAN).

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga kesulitan yang ditemui penulis dapat dilalui dan diatasi. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Suryanef, M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, koreksi dan petunjuk kepada penulis.
2. Bapak Drs. Hasrul, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan masukan yang membangun bagi penulis sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Helmi Hasan, M.Pd, bapak Drs. M.Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan ibu Drs. Al Rafni, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Lince Magriasti, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan akademik kepada penulis.
5. Ketua dan sekretaris jurusan Ilmu Sosial Politik Politik FIS UNP yang telah memberikan bantuan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat serta rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Semoga segala bimbingan, bantuan, petunjuk dan arahan yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mohon maaf atas segala kekurangan skripsi ini dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Padang,   Maret 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Penelitian .....	13
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian Teori .....	14
1. Pendidikan Politik .....	14
2. Partai Politik .....	32
3. Masyarakat .....	34
B. Kerangka Konseptual .....	37
<b>BAB III   METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian .....	38
B. Informan Penelitian .....	39

	C. Jenis dan Sumber Data .....	40
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
	E. Alat Pengumpulan Data .....	41
	F. Uji Keabsahan Data .....	42
	G. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
	A. Temuan Umum .....	45
	B. Temuan Khusus.....	49
	C. Pembahasan.....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Saran.....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil Penghitungan Suara Pemilukada .....	6
Tabel 1.2	Hasil penghitungan suara yang rusak pada pemilukada.....	6
Tabel 1.3	Hasil penghitungan suara di Kecamatan Bungo Dani .....	7
Tabel 1.4	Hasil Penghitungan Suara Yang Rusak di Kecamatan Bungo Dani. ....	7
Tabel 2.1	Nama Informan Penelitian dari Partai Politik .....	39
Tabel 2.2	Nama Informan Penelitian dari Masyarakat dan Anggota Partai .	40
Tabel 3.1	Program Kerja Partai Golongan Karya .....	49
Tabel 3.2	Program Kerja Partai Amanat Nasional .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Kerangka Konseptual .....	37
Gambar 1.1 pelaksanaan program KARAKTERDES di DPD Golkar Bungo .....	51
Gambar 1.2 pertemuan pengurus PAN dengan tokoh masyarakat .....	60

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I. Pedoman wawancara
- Lampiran II. Surat izin penelitian

## **BAB I LATAR BELAKANG**

### **A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia yang demokratis, sudah cukup lama menjadi harapan besar bagi rakyat Indonesia. Proses daripada pencapaian demokrasi itu sendiri membutuhkan partisipasi politik yang otonom daripada warga Negara Indonesia.

Partai politik merupakan salah satu bagian penting dari sebuah sistem demokrasi, karena keberadaan partai politik merupakan barometer demokratis tidaknya sistem politik dalam sebuah negara. Harapan bagi terwujudnya demokrasi adalah bahwa partai politik benar- benar menjadi saluran dasar dari masyarakat menuju kepentingan masyarakat.

Partai politik dalam era modern dimaknai sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Miriam Budiardjo, 1998).

Menurut UU. No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan :

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Menurut Masad Masrur (2007) partai politik memiliki beberapa fungsi yang mana salah satunya memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan pengenalan organisasi politik, lembaga kekuasaan dan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga tercipta kesadaran politik. Jika fungsi partai politik itu dilaksanakan dengan baik oleh partai-partai, maka tertib sosial akan terjamin, dengan demikian segenap lapisan dan golongan yang ada dalam masyarakat dapat membangun dan merealisasikan cita-cita mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan partai politik yang tertuang dalam UU. No.2 Tahun 2008 Pasal 10 Tentang Partai Politik yakni mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan UU. No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU. No 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, Partai Politik mendapatkan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
- c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu sistem politik. Di satu pihak, warga Negara merupakan informasi minimal tentang hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki untuk dapat memasuki arena kehidupan politik. Di lain pihak, warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, “pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Berkenaan dengan pendidikan politik, merupakan poin krusial yang harus dilakukan oleh partai politik kepada anggota dan masyarakat. Partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan tanpa ada yang namanya proses evaluasi. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elite dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Partai politik yang oleh Antonio Gramsci dikategorikan sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil (Roger Simon, 1999), diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai *Instrumen Of Political Education* dengan baik dan benar.

Partai politik sebagai salah satu lembaga yang memberikan pendidikan politik sangat minim dalam melakukan pendidikan politik dan juga dalam upaya membentuk kader partai yang berkualitas. Pendidikan politik lewat partai politik sangat rendah dan kurang menyentuh level bawah. Pendidikan politik juga minim dikalangan masyarakat sipil. Hal ini karena masyarakat sendiri memaknai politik sebagai sesuatu yang kotor, penuh konspirasi dan hanya saling mencera dan menyerang antara kelompok masyarakat dalam rangka mendapatkan kekuasaan. Pemahaman ini menyebabkan sebagian kelompok masyarakat kita menjadi apatis dan masa bodoh (Daryono, 2011).

Menurut Yudi Latief dalam *Pikiran Rakyat* (2010), demokrasi hanya bisa berjalan baik bila warganya ikut aktif berpartisipasi. Namun kenyatannya hal itu tidak terwujud karena pendidikan politik masyarakat sangat terbatas. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan karena partai politik yang memiliki tugas memberikan pendidikan politik pada masyarakat tidak menjalankan fungsinya.

Menurut Effendi (2009), bukti tidak tercapainya pendidikan politik dan demokrasi di Indonesia adalah besarnya angka golput (golongan putih) dan surat suara yang tidak sah. Selain hal teknis tersebut, pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh partai politik dan massa pendukungnya, masih banyak terjadi. Dalam hal ini, partai politik memang dianggap kurang memainkan perannya dalam mensosialisasikan pemilu damai, apalagi memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Undang-undang No.2 Tahun 2008 tentang kewajiban parpol memberikan pendidikan politik bagi massa belum

terlaksana. Saat ini parpol hanya berfungsi sebagai alat pencari massa dan kekuasaan saja. Padahal pendidikan politik bagi masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi.

Sementara Gede H. Cahyana dalam *Pikiran Rakyat* (2010), mengatakan minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum menandakan bahwa pendidikan politik di Indonesia tidak berhasil. Dampaknya tingkat kedewasaan demokrasi warga dan masyarakat politik di Indonesia tidak terjadi.

Dari lima fungsi partai politik yang ada, terlihat partai politik hanya memainkan peran tak jauh dari urusan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Sedangkan peranannya untuk melakukan pendidikan politik, rekrutmen politik dan sosialisasi politik dalam konteks perkaderan anak bangsa jelas terlihat masih sangat terbatas (Agun, 2011).

Salehudin Awal dalam *Ahdiat* (2009) berpendapat bahwa program pendidikan politik yang pernah dilakukan oleh partai politik belum mencapai pada level yang diharapkan yakni, terbangunnya wawasan dan praktek politik yang rasional dan beradab sebagian masyarakat kita. Sinyalemen tersebut bisa dicermati pada satu aspek dalam politik yaitu memilih calon legislatif dan eksekutif.

Minimnya pelaksanaan pendidikan politik di Kecamatan Bungo Dani ditandai dengan rendahnya partisipasi politik, kesadaran politik dan pengetahuan politik masyarakat, hal itu dapat dilihat dalam pemilukada

bupati dan wakil bupati Bungo priode 2011-2016 yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel. 1.1 Hasil perhitungan suara pemelukada bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo priode 2011-2016**

No	Uraian	Jumlah	%
1	Pemilih Terdaftar	213.264	100
2	Menggunakan Hak Pilih	165.614	77,65
3	Tidak Menggunakan Hak Pilih	47.650	22,34

*Sumber: KPUD Bungo*

**Tabel.1.2 hasil perhitungan suara yang tidak menggunakan hak pilih pada pemelukada buapati dan wakil bupati Kabupaten Bungo priode 2011-2016**

No	Uraian	Jumlah	%
1	Tidak Menggunakan Hak Pilih	47.650	100
2	Suara Tidak Sah	12.348	25,91
3	Suara Tidak Terpakai / Tidak Hadir Memilih	35.302	74,09

*Sumber: KPUD Bungo*

Berdasarkan tabel diatas, pada pemelukada bupati dan wakil bupati di Kab. Bungo yang tidak menggunakan hak pilih yaitu 22,34%, Dari 213.264 hak suara yang terdaftar Hanya 165.614 yang menggunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati masih ada sekitar 47.650 yang tidak menggunakan hak pilih yang terdiri dari 12.348 suara yang tidak sah atau rusak dan 35.302 suara yang tidak digunakan karena tidak hadir untuk memilih. hal itu menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat. Begitu juga dengan tingkat partisipasi politik pemilih yang terjadi dikecamatan Bungo Dani dalam pemelukada

bupati dan wakil bupati Bungo priode 2011-2016 yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel. 1.3 Hasil perhitungan suara pemelukada bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo priode 2011-2016 di Kec. Bungo Dani**

No	Uraian	Jumlah	%
1	Pemilih Terdaftar	15.882	100
2	Menggunakan Hak Pilih	11.775	74,14
3	Tidak Menggunakan Hak Pilih	4.107	25,86

*Sumber: KPUD Bungo*

**Tabel 1.4 hasil perhitungan suara yang tidak menggunakan hak pilih pada pemiliukada bupati dan wakil bupati Kab. Bungo priode 2011-2016 di Kec. Bungo Dani**

No	Uraian	Jumlah	%
1	Tidak menggunakan hak pilih	4.107	100
2	Suara tidak sah	743	18,09
3	Suara Tidak Digunakan / Tidak Hadir Memilih	3.364	81,91

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa di Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo angka yang tidak menggunakan hak pilihnya masih tergolong besar yakni 25,86% atau 4.107 yang tidak menggunakan hak pilih. Dari 4.107 suara yang tidak digunakan terdapat 743 suara yang tidak sah dan 3.364 suara yang tidak digunakan yang diasumsikan tidak hadir untuk memilih.

Efektivitas dan efisiensi pendidikan politik perlu terus ditingkatkan, karena itu, pemerintah, para pemegang peran dan agen-agen politik perlu memperhatikan karakteristik pendidikan politik, dan karakteristik pembelajaran orang dewasa, serta media penunjang pembelajarannya. Meskipun selama ini, pendidikan politik sudah dilaksanakan, namun

partisipasi dan kesadaran politik masyarakat masih relatif rendah. Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan (Paul Sinlaeloe, 2008).

Di Indonesia ada beberapa partai besar yang memiliki pendukung yang cukup loyal dan pada setiap agenda politik yang diselenggarakan. Dalam hal ini seperti partai Golongan Karya ( GOLKAR ) dan Partai Amanat Nasional ( PAN ). Kedua partai politik tersebut mempunyai ideologi atau haluan tersendiri dan konstituen sendiri serta memiliki platform serta visi dan misi yang berbeda antara satu sama lain yang intinya memiliki tugas sebagai organisasi pelaksana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Pendidikan politik merupakan suatu usaha pengenalan organisasi politik, lembaga kekuasaan, dan pemerintahan kepada anggota dan masyarakat, sehingga tercipta kesadaran politik yang berujung nantinya kepada partisipasi politik dalam pemilu.

Partai Golkar merupakan partai yang sudah lama berdiri, pada masa orde baru partai Golkar bukanlah sebuah partai politik tetapi dianggap sebagai suatu organisasi massa. Partai Golkar bermula dari berdirinya sekber GOLKAR di masa-masa akhir pemerintahan presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk melindungi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber GOLKAR berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta pemilu.

Program pendidikan politik yang pernah dilakukan oleh partai Golkar yaitu memberikan bimbingan dan bantuan serta pendidikan politik bagi bagi rakyat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa (Azis Syamsuddin dalam Horizon, 2007).

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik berhaluan islam di Indonesia. Asas partai ini adalah “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekalian Alam”. PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Sejarah kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhamadiyah, dan Kelompok Tebet.

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Untuk terwujudnya *Indonesia baru*, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

Salah satu program pendidikan politik yang pernah dilaksanakan Partai Amanat Nasional menurut Juwarno dalam Lili Sunardi (2010) yakni

melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan itu bisa dilihat dari banyaknya partisipasi masyarakat yang mengikuti pemilu.

Selain itu program pendidikan politik yang pernah dilaksanakan oleh Partai Amanat Nasional menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) A Bakri HM yakni DPP PAN telah menginstruksikan agar setiap daerah memiliki basis advokasi dan basis pelatihan atau pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan program seperti itu, PAN telah memerankan fungsi pendidikan politik sekaligus menjadi sarana untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional sebagai partai yang cukup besar di Indonesia dituntut untuk memberikan pendidikan politik secara menyeluruh kepada anggota partai dan masyarakat. Di Kecamatan Bungo Dani, Kab. Bungo kedua partai ini memiliki pengikut yang cukup banyak. Hal itu terbukti dengan keantusiasan saat kampanye pemilu legislatif 2009 berlangsung dan pada hasil pemilu 2009 kedua partai tersebut berhasil memperoleh suara yang cukup banyak terutama suara untuk anggota legislatif di Kabupaten Bungo, sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang, **“Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat oleh Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional di Kecamatan Bungo Dani”** mengingat masyarakat merupakan bagian penting dari keberlangsungan demokrasi yang di anut oleh negara Indonesia.

Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini membahas pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat dan membahas tentang bagaimana pelaksanaan, media, materi dan metoda, serta kendala dan solusi secara khusus dan terpisah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang meneliti pendidikan politik oleh parpol kepada sub masyarakat yakni generasi muda saja dan secara umum hanya membahas tentang pelaksanaan, kendala dan solusi oleh parpol dalam melaksanakan pendidikan politik.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Golkar dan PAN kepada masyarakat di Kecamatan Bungo Dani.
2. Media pendidikan politik yang digunakan oleh partai Golkar dan PAN bagi masyarakat di Kecamatan Bungo Dani.
3. Bagaimana materi dan metoda yang digunakan oleh partai Golkar dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Bungo Dani.
4. Kendala dan solusi yang dilakukan oleh partai Golkar dan PAN didalam pelaksanaan pendidikan politik.

#### **C. Batasan Masalah**

Sehubungan dengan identifikasi masalah tersebut dan begitu luasnya permasalahan ini serta keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka

batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan, media, materi dan metoda serta hambatan dan solusi oleh partai Golkar dan PAN dalam melaksanakan pendidikan politik di Kecamatan Bungo Dani.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaan tersebut, adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan politik oleh partai Golkar dan PAN bagi masyarakat di Kecamatan Bungo Dani?
2. Apa media yang digunakan oleh partai Golkar dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Bungo Dani?
3. Apa materi dan metoda yang digunakan partai Golkar dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Bungo Dani?
4. Bagaimana kendala dan solusi yang dilakukan oleh partai Golkar dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kecamatan Bungo Dani?

#### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan politik oleh partai GOLKAR dan PAN kepada masyarakat di Kecamatan Bungo Dani.
2. Untuk mengetahui media yang digunakan oleh partai GOLKAR dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kecamatan Bungo Dani.

3. Untuk mengetahui materi dan metoda yang digunakan partai GOKAR dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Bungo Dani.
4. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan oleh partai GOLKAR dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat di Kecamatan Bungo Dani.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik khususnya berkaitan dengan pendidikan politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya kajian tentang sistem politik Indonesia.

##### 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah, partai politik, dan LSM agar senantiasa memberikan pendidikan politik secara berkesinambungan bagi masyarakat.
- b. Sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan, juga dimaksudkan sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan (skripsi).
- c. Sebagai masukan dan landasan berpijak bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pendidikan politik.